

## Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sempurna Perspektif Islam

Rian Luqman Aziz<sup>1</sup>, U. Sulia Sukmawati<sup>2</sup>, Gustina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: rianluqman4@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Tanjungpura, e-mail: suliasukmawati@untan.ac.id

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: gustinasbs@gmail.com

### Histori Naskah

### ABSTRACT

*This research is motivated by community empowerment and development in Perfect Village, Subah District, seen from the level of village independence as measured based on the Village Development Index (IDM). The theories used in this research are: 1) Community Empowerment in Islam 2) Village Development Index, 3) The Role of Government in Development Based on Community Empowerment. This research uses a qualitative research approach which is field research in nature and tends to use analysis which focuses more on process. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data sources used, namely primary, are the Village Head, BPD, and the local community in Perfect Village. Research data analysis techniques are data reduction, data presentation, drawing conclusions. The data validity technique used is data source triangulation.*

*Based on the research results, the implementation of community empowerment in Perfect Village is in accordance with the Islamic perspective by including first, the entire community gets justice in empowerment, with a priority scale system. Second, the entire community has the same freedom to submit proposals during deliberations. Third, involving the community in joint decision making and in implementing development. Fourth, the public is encouraged to work hard in the form of stimulation and encouragement to take part in the Republic of Indonesia's Independence Day activities. Fifth, it is recommended that RT/RW provide cash to be used for needs of residents in need and for small-scale development. The village government's efforts in empowering the community towards development are first, encouraging children of school age but not in school, and those in poor condition through village funds, cooperative assistance and student PKH, as well as KIP for students. Second, the village government collaborates with cooperatives and gapoktan to facilitate economic activities. Third, socio-cultural development through budgets and so on, which are given according to deliberation decisions. Fourth, the community is encouraged to work hard in the form of motivation and encouragement to take part in R HUT activities. Fifth, the village government provides access to the community for political activities, such as data processing officers, pantarlih, KPPS, and socialization about politics.*

**Keywords** : *Community Empowerment, Village Development from an, Islamic Perspective*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa Sempurna Kecamatan Subah dilihat dari tingkat kemandirian desa yang diukur berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam 2) Indeks Desa Membangun, 3) Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu primer adalah Kepala Desa, BPD, dan masyarakat setempat di Desa Sempurna. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian

---

data, menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi* sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan pemberdayaan masyarakat di Desa Sempurna sudah sesuai dengan perspektif Islam dengan meliputi *pertama*, seluruh masyarakat mendapatkan keadilan dalam pemberdayaan, dengan sistem skala prioritas. *Kedua*, seluruh masyarakat mendapatkan kebebasan yang sama dalam mengajukan usulan saat musyawarah. *Ketiga*, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, dan dalam pelaksanaan pembangunan. *Keempat*, masyarakat didorong untuk bekerja keras berupa motivasi, dan himbauan untuk mengikuti kegiatan HUT RI. *Kelima*, RT/RW direkomendasikan mengadakan uang kas, untuk digunakan keperluan warga yang membutuhkan dan pembangunan skala kecil. Upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan yaitu *pertama*, mendorong anak dalam usia sekolah tetapi tidak sekolah, dan kondisi tidak mampu melalui anggaran dana desa, bantuan koperasi dan PKH pelajar, serta KIP untuk mahasiswa. *Kedua*, pemerintah desa bekerjasama dengan koperasi dan gapoktan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. *Ketiga*, pembinaan sosial budaya melalui anggaran dan sebagainya, yang diberikan sesuai keputusan musyawarah. *Keempat*, nilai-nilai demokrasi diterapkan saat musyawarah, masyarakat diberikan kebebasan memberikan usulan. *Kelima*, pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat dalam kegiatan politik, seperti petugas perpal data, pantarlih, KPPS, dan sosialisasi tentang politik.

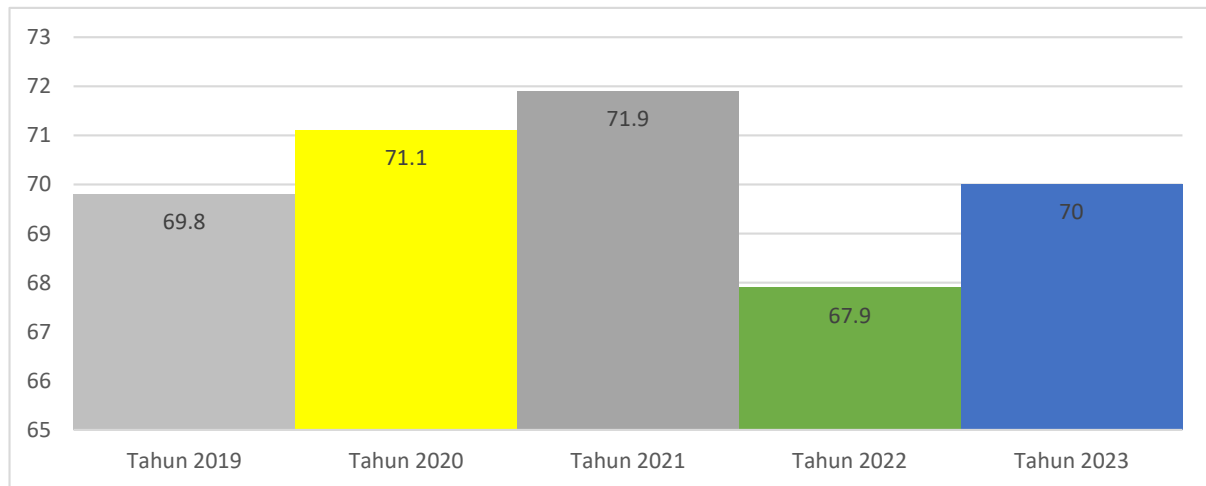
***Kata Kunci*** : Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Perspektif Islam

***Corresponding Author*** : Rian Luqman Aziz, e-mail: rianluqman4@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, khususnya dalam membangun, seperti pemberian bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dapat ditingkatkan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, dibayar dengan dana yang diterima dari anggaran alokasi dana desa. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menekankan pada tiga aspek yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan (Hakim, 2020).

Dalam upaya percepatan pembangunan dari pinggiran, pemerintah Indonesia menerapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi dana desa merupakan sumber utama pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa (30%) dan pemberdayaan masyarakat desa (70%). Alokasi dana desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pembangunan di desa (Saputri & Rahayu, 2023).



Gambar 1. Dana Desa Indonesia Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah) (Direktorat Jenderal Anggaran, 2023)

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi dilakukan untuk merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Menurut al-Ghazali kegiatan ekonomi telah menjadi bagian dari kegiatan sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika kondisi itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa (Saeful, 2020). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2010):

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ﴾ (القصص/28: 26)

Terjemahnya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas/28:26).

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai pemberdayaan masyarakat (Imam Ahmad bin Hanbal, 1993):

رَسُولَ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ دَتْنًا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ  
نَاصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَّ هُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Thalhah bin Yahya ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Negeri Yaman. Maka beliau memerintahkan kepada keduanya untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada Masyarakat”.

Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan tentang kepatuhan kepada tuhan, Islam pun mengajarkan agar setiap manusia memiliki perhatian kepada sesama. Artinya, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam (Saeful, 2020).

Kabupaten Sambas mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis, khususnya dalam pengembangan perekonomian wilayah perbatasan Malaysia, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun usaha untuk menjadikan wilayah perbatasan negara diantaranya wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas sebagai wilayah terdepan negara bukanlah hal yang mudah. Karena dalam prosesnya membutuhkan investasi, alokasi anggaran yang besar, serta diperlukan komitmen nasional dalam upaya pengembangannya. Investasi, alokasi anggaran yang besar, dan komitmen nasional merupakan komponen penting dalam proses pembangunan. Karena wilayah perbatasan Kabupaten Sambas secara umum kurang memiliki fasilitas sosial ekonomi, maka masyarakat perbatasan berorientasi ekonomi ke Sarawak, baik dari arah arus orang maupun barang. Sehingga secara keseluruhan kawasan perbatasan negara Kabupaten Sambas menjadi *hinterland* wilayah Serawak, Malaysia (Purnamasari et al., 2016).

Kecamatan Subah terbagi ke dalam 13 desa, yaitu Arga Pura, Balai Gemuruh, Bukit Mulya, Karaban Jaya, Madak, Mensade, Mukti Raharja, Sabung, Sapak Hulu Trans, Sempurna, Sungai Deden, Sungai Sapak, dan Tebuah Elok. Kecamatan Subah merupakan salah satu kecamatan yang berstatus IDM maju namun menempati peringkat terakhir dengan nilai 0,79062, disusul Kecamatan Selakau Timur dengan nilai 0,81438 dan Kecamatan Sambas di Kabupaten Sambas yang mempunyai peringkat tertinggi dengan nilai 0,90748 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2021).

Desa Sempurna memiliki potensi pertumbuhan penduduk terbesar di Kecamatan Subah, dan industri perkebunan penting bagi pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan di Desa Sempurna masih menggunakan pola klasik dengan hanya berfokus pada kegiatan pembangunan fisik. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Desa Sempurna telah membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana prasarana, dan sarana pemberdayaan masyarakat lainnya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan hasil perencanaan yang telah dilaksanakan sejalan dengan arah pembangunan desa yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Permusyawaratan desa mengenai prioritas pembangunan tetap harus dilakukan sejak awal dalam upaya menjaga kualitas perencanaan desa partisipatif. sehingga keputusan-keputusan yang diambil pada musyawarah desa menjadi pedoman bagi tim penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk pembangunan di desa (Halimah & Karyana, 2017). Berikut status kemajuan Desa Sempurna tahun 2019-2023:

No.	Tahun	Nama Desa	Nilai IDM	Status IDM
1.	2019	SEMPURNA	0,7351	MAJU
2.	2020	SEMPURNA	0,7351	MAJU
3.	2021	SEMPURNA	0,7351	MAJU
4.	2022	SEMPURNA	0,8859	MANDIRI
5.	2023	SEMPURNA	0.8665	MANDIRI

Tabel 1. Status Kemajuan Desa Sempurna tahun 2019-2023 (Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, 2023)

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Sempurna pada tahun 2019-2021 Desa Sempurna meraih nilai dengan angka 0,7351 status desa maju, pada tahun 2022 meraih nilai dengan angka 0,8859 status desa mandiri yang menempati pada peringkat tertinggi di Kecamatan Subah. Namun pada tahun 2023 nilai IDM Desa Sempurna mengalami penurunan dengan nilai 0.8665 dan menempati di peringkat ke lima. Terbukti bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Sempurna berpengaruh terhadap indeks pembangunan desa, dengan peningkatan pembangunan infrastruktur mengakibatkan penurunan. Dari semua komponen yaitu IKS, IKL dan IKE merupakan komponen yang sudah terpenuhi secara syarat dalam menentukan status desa mandiri pada Desa Sempurna (Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Sempurna dan upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan di Desa Sempurna. Dengan mengamati kondisi dan potensi di Desa Sempurna seperti tertulis di atas maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sempurna Perspektif Islam”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang bersifat *field research* yaitu dengan menggambarkan, menceritakan atau menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara. Penelitian ini menyajikan karakteristik sesungguhnya dari fenomena yang terjadi di lapangan (Prof. Dr. Sugiyono, 2013). Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023. Data yang terkumpul selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami. *Setting* penelitian dilakukan di Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Prof. Dr. Sugiyono, 2013). Peneliti juga menggunakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan (Prof. Dr. Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam di Desa Sempurna

Konsep pemberdayaan masyarakat telah mewujudkan oleh Rasulullah SAW. Ia mencontohkan terkait konsep keadilan, persamaan, dan partisipasi sosial. Sejak masa Rasulullah SAW, telah terjalin sikap yang benar-benar toleran, dengan prinsip selalu menjunjung tinggi menghargai etos kerja dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) agar seluruh warga negara dapat mengikuti ajaran agama. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar

masyarakat tidak akan ada lagi ketika ada persamaan kesempatan dan akses terhadap peluang berusaha (Masykur Hakim dan Tanu Wijaya, 2003).

1) Prinsip Keadilan

Seluruh masyarakat Desa Sempurna mendapatkan keadilan dalam pemberdayaan, tentunya terdapat sistem skala prioritas yaitu, dari segi fungsi dan manfaatnya secara luas dan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Kontribusi hasil pengusaha ram, kebun sawit dan APBDes, akan menjadi anggaran belanja pemerintah desa untuk melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja pada jenis pekerjaan kasar dan jenis pekerjaan lembut untuk masyarakat khusus seperti minimal memiliki ijazah SMA.

2) Prinsip Persamaan

Masyarakat Desa Sempurna walaupun berbeda-beda suku, agama, dan sebagainya, tetapi semuanya menyatu mendapatkan pemberdayaan dan diberikan kebebasan yang sama dalam mengajukan usulan apapun saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. yang akan ditampung dan diterima oleh pemerintah desa tanpa membedakan kalangan. Pemerintah desa memberikan izin pemanfaatan tanah kosong kepada seluruh masyarakat untuk berkebun dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing.

3) Prinsip Partisipasi

Pemberdayaan di Desa Sempurna selalu melibatkan perwakilan perangkat desa, BPD, LPM, RT, RW, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, kesehatan, BKM dan kelompok tani dalam pengambilan keputusan bersama. Pelaksanaan pembangunan terdapat tim Pelaksana Kerja Tempatan yang sudah ditunjuk melibatkan masyarakat mengerjakan dari awal sampai selesai dan terdapat juga yang tidak bisa dikerjakan dari awal sampai selesai.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk bekerja keras berupa rangsangan, himbuan dan ajakan kepada masyarakat agar mengikuti pelaksanaan pada kegiatan HUT RI ataupun kegiatan yang dikaitkan dengan perlombaan dan akan diadakan hadiah serta penghargaan untuk masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti pada bulan Agustus dijadikan kepanitiaan HUT RI, pengurus BKM dan pada kegiatan yang diadakan oleh instansi lain.

5) Tolong-menolong

Pemerintah desa merekomendasikan kepada RT/RW untuk mengadakan uang kas, agar dapat digunakan untuk pembangunan skala kecil, keperluan warga yang sakit, tua, janda dan sebagainya. Masyarakat yang perlu diberdayakan, pemerintah desa membantu dan menyusun untuk pelaksanaan pemberdayaan melalui bantuan BLTDD, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai menggunakan berupa beras dan jenis bantuan lainnya.

## **B. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pembangunan di Desa Sempurna**

Penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kelemahan masyarakat atau mempersiapkan masyarakat berupa sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keahlian. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat diberdayakan dari segi pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik (Sugiri, 2012).

1) Pemberdayaan Pendidikan

Upaya pemerintah Desa Sempurna dalam meningkatkan pendidikan yaitu dengan melibatkan unsur pendidikan pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, jika terdapat usulan bisa langsung diusulkan. Apabila terdapat anak-anak yang masih dalam usia sekolah tetapi tidak sekolah ataupun keluar sekolah, kondisi tidak mampu dan sebagainya, maka akan didorong oleh pemerintah desa melalui anggaran dana desa untuk diperbantukan kepada masyarakat. Desa Sempurna terdapat prasarana PAUD, SD, dan SMP. Pada program PKH terdapat bantuan untuk pelajar dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, agar dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan meringankan beban keluarga.

Adapun bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk tingkat perkuliahan dari pemerintah desa, terdapat 1 orang untuk sekolah dari Dusun Kang Asih. Apabila sekolah atau kuliah banyak memerlukan persyaratan dan sebagainya serta tidak memiliki kendaraan maka pemerintah desa siap membantu. Desa Sempurna terdapat koperasi, yang mana semua anggota koperasi adalah hampir semua wali murid, mereka mengusahakan untuk membantu masyarakat dan untuk siswa/siswi yang berprestasi tingkat SD dan PAUD.

Peningkatan keterampilan masyarakat Desa Sempurna masih melatih secara masing-masing kepada masyarakat yang lainnya. Pemerintah desa berusaha selalu mengajak masyarakat untuk menuntut ilmu, membuka diri dan bersama-sama dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Namun, belum ada kesadaran dari masyarakat, maka pemerintah desa hanya berusaha mencari solusi agar masyarakat bisa tertarik.

## 2) Pemberdayaan Ekonomi

Program pemerintah desa dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui koperasi dan gapoktan, yaitu mengadakan musyawarah bersama ketua koperasi yang membahas bibit sawit, agar masyarakat menggunakan bibit sawit yang terverifikasi pada saat pelaksanaan replenting. Pemerintah desa bekerjasama dengan koperasi dan kelompok tani, dengan membina melalui petugasnya, apabila memerlukan bantuan apapun bisa langsung konsultasi, bertukar pikiran, membuat program dengan melibatkan kepala desa.

Pemerintah desa memberikan izin pengelolaan tanah kosong milik pemerintah desa kepada seluruh masyarakat, Pemerintah desa memberikan modal secara langsung hanya untuk BUMDes, Penyediaan akses informasi di Desa Sempurna terdapat di depan kantor desa yaitu papan informasi nilai total anggaran yang digunakan, dan diterima, serta total pelaksanaan kegiatan baik pada bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Informasi lainnya akan disampaikan melalui media sosial.

## 3) Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemerintah Desa Sempurna mendukung dalam penyediaan sarana prasarana sosial budaya dan memfasilitasi anggaran untuk kegiatan. Seperti pemerintah desa menyediakan tempat dan membantu secara berkontribusi untuk kegiatan BKMT, yang menggunakan anggaran murni dari Kecamatan Subah. Pembinaan sosial budaya masyarakat oleh pemerintah desa adalah memfasilitasi dalam bentuk anggaran per satu tahun, pada setiap kesenian yang sifatnya sudah tetap dan sudah di SK kan oleh pemerintah desa, seperti tanjidor.

Pemerintah desa dalam memberikan bantuan/dana sosial selalu mengadakan musyawarah khusus dan akan dicari masyarakat yang layak menerima bantuan seperti BLTDD, bantuan beras dan sebagainya. Penerima bantuan tersebut adalah orang yang sudah lanjut usia, tidak mampu, tidak mampu serta tidak memiliki kebun dan orang yang tidak termasuk penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti PKH dan Keluarga Penerima Manfaat. Di Desa Sempurna dalam pembinaan swadaya lokal, dan swadaya

masyarakat masih masing-masing, tetapi sudah dianjurkan kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam berswadaya, namun terkadang masyarakat kurang berpartisipasi

#### 4) Pemberdayaan Psikologi

Upaya pemerintah desa dalam mengubah pola pikir masyarakat dengan menyampaikan kebenaran terhadap segala kesalahan faham masyarakat dalam menanggapi suatu masalah seperti masalah kesehatan, anggaran pemerintah desa, BLTDD, bantuan beras dan sebagainya, yang disampaikan pada saat pelaksanaan musrenbang. Pemerintah desa juga membuat pengumuman melalui media sosial, apabila ada petugas dinas terkait yang akan datang ke Desa Sempurna dan mengadakan suatu kegiatan. Dengan begitu sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat akan berubah.

Desa Sempurna tentunya nilai-nilai demokrasi sudah diterapkan, pada saat musyawarah masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan usulan apapun demi menentukan suatu kebijakan atau keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah desa. Begitu juga pada saat memberikan kata sambutan dari kepala desa, yang mana selalu menyampaikan terkait kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, pada saat acara hajatan, hari besar keagamaan, hari besar nasional, dan sebagainya.

#### 5) Pemberdayaan Politik

Pemerintah desa sebagai sekretariat pada kegiatan politik, sangat terbuka dalam memberikan akses dan sudah banyak menyampaikan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan dan pelaksanaannya, khususnya pelaksanaan pemilu baik partai politik, pemilihan kepala desa sampai tingkat provinsi, DPR provinsi, DPR kabupaten dan Presiden. Seperti pelaksanaan tugasnya dari perpal data, petugas pantarlih, petugas KPPS, dan sosialisasi tentang politik dan sebagainya.

Pemerintah desa sudah banyak menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai elemen, agar berpartisipasi atau ikut andil dalam kegiatan politik, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang tidak ingin tahu tentang politik. Masyarakat dihimbau agar ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pilkada, pilkades dan pilleg. Dalam pelaksanaan kegiatan politik, bentuk andil pemerintah desa adalah memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan politik, seperti pelaksanaan pilkada dan pilres, sekretariat PPS terdapat di kantor desa.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Sempurna perspektif Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Implementasi pemberdayaan masyarakat di Desa Sempurna beberapa prinsip sudah diterapkan sejalan dengan perspektif Islam dengan meliputi prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip penghargaan terhadap etos kerja, dan prinsip tolong-menolong.
2. Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan di Desa Sempurna telah memenuhi beberapa variabel yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan yaitu, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2021). *Kecamatan Subah Dalam Angka Tahun 2021*. <https://sambaskab.bps.go.id/>
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok, Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas. (2021). *Peringkat Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun Tahun 2021*. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas: Sambas.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas. (2023). *Peringkat Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun Tahun 2023*. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas: Sambas.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2023). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023*. Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hakim, L. (2020). *PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA. 1*.
- Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13544>
- Imam Ahmad bin Hanbal. (1993). *Musnad A-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dar al Fikri, Beirut.
- Masykur Hakim dan Tanu Wijaya. (2003). *Model Masyarakat Madani*. Jakarta, Intimedia Cipta Grafika.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Purnamasari, W., Kara, M. H., & Sabri, M. (2016). *PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA MALAYSIA DI SAMBAS. 04*.
- Saeful, A. (2020). *Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti. 3*.
- Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2780>
- Sugiri, L. (2012). *PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*.